

**Pengaruh Religiusitas Dan Good Governance Terhadap Ethical Behavior Dengan Ethical Climate Sebagai Variabel Mediating Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

**Fauzan**

Universitas Kanjuruhan Malang  
fauzansholeh76@gmail.com

**Sulistyo**

Universitas Kanjuruhan Malang  
E-mail : phibinusi@gmail.com

**Rita Indah Mustikowati**

Universitas Kanjuruhan Malang  
E-mail : rita\_fairuz@yahoo.com

**WORKING PAPER**

**untuk disajikan dalam  
Konferensi Regional Akuntansi (KRA) III  
Universitas Jember  
Rabu – Kamis, 20 – 21 April 2016**

# **Pengaruh Religiusitas Dan Good Governance Terhadap Ethical Behavior Dengan Ethical Climate Sebagai Variabel Mediating Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

**Fauzan**

Universitas Kanjuruhan Malang  
fauzansholeh76@gmail.com

**Sulistyo**

Universitas Kanjuruhan Malang  
E-mail : phibinusi@gmail.com

**Rita Indah Mustikowati**

Universitas Kanjuruhan Malang  
E-mail : rita\_fairuz@yahoo.com

**Abstrak** : Perilaku etika dalam organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Prinsip-prinsip perilaku etis dalam sektor publik tercermin dalam penerapan dan pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*). Selain itu agama dan keberagamaan (*religiusitas*) menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat. Masalah dalam penelitian ini adalah, apakah ada pengaruh keberagamaan (*religiosity*) dan tata kelola yang baik (*good governance*) terhadap perilaku etis (*ethical behavior*). Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh religiusitas dan *good governance* terhadap *ethical behavior* dan *ethical climate* sebagai mediating dalam pengelolaan Dana BOS SMP di Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis penelitian adalah survey. Populasinya sekolah SMP Negeri dan Swasta penerima Dana BOS, ada 61 SMP Negeri dan 200 SMP Swasta penerima Dana BOS di Kabupaten Bangkalan. Teknik pengambilan sampelnya adalah *simple random sampling*. Adapun sampel yang dipilih adalah sebanyak 155 sekolah SMP Negeri dan Swasta. Teknik pengambilan datanya menggunakan kuesioner. Unit analisisnya adalah kepala sekolah SMP baik negeri dan swasta sebagai pengambil kebijakan pengelolaan Dana BOS. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan alat analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa religiusitas dan *good governance* berpengaruh langsung dan signifikan terhadap *ethical behavior* dan *ethical climate* dalam pengelolaan dana BOS. *Ethical climate* tidak memediasi hubungan antara religiusitas dan *good governance* terhadap *ethical behavior*. Kontribusi dari penelitian ini secara teoritis adalah motivasi kepada para pengelola Dana BOS (Kepala Sekolah) untuk meningkatkan kualitas keberagamaannya serta menerapkan dan melaksanakan *good governance* yang baik agar organisasi memiliki perilaku yang etis (*ethical behavior*). Kontribusi secara kebijakan adalah pemerintah harus konsisten untuk memberikan *reward* dan *punishment* kepada lembaga atau organisasi publik yang menerapkan atau tidak menerapkan *good governance* dalam organisasinya.

**Kata kunci** : *Religiusitas, Good Governance, Ethical Climate, Ethical Behavior*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Etika sangat penting diterapkan dalam berbagai aktivitas untuk menciptakan nilai moral yang baik. Etika bukan hanya sekedar konsep untuk dipahami, namun harus menjadi bagian dari diri dan diterapkan dalam berbagai aktivitas kehidupan (Suseno, 1987). Etika sebagai modal utama moralitas dalam kehidupan yang menuntut untuk berbuat baik (Aristoteles, 1953). Etika yang baik, mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk, mencerminkan perilaku yang buruk pula. Etika menjadikan individu lebih bertanggung jawab, adil dan responsive. Etika merupakan kebiasaan yang benar dalam pergaulan. Etika dapat dirumuskan sebagai suatu batasan yang menilai tentang salah atau benar serta baik atau buruk suatu tindakan (Bertens, 2000). Agama menjadi salah satu sumber etika. Agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan perannya sebagai landasan moral dan etika dalam bermasyarakat.

Kajian mengenai etika sudah banyak dilakukan oleh para peneliti dan akademisi. Baik dibidang Akuntansi, Manajemen, Organisasi, Politik, dan lain sebagainya. Obyek penelitian dibidang etika juga beragam, yaitu : di perusahaan, pemerintahan, karyawan, dan lain sebagainya. Kajian etika tersebut meliputi, yaitu : perilaku yang beretika (M. S. Schwartz & Weber, 2006; M. Schwartz, 2001), perilaku kepemimpinan (Brown, Treviño, & Harrison, 2005; Brown & Treviño, 2006), iklim yang beretika (Cullen, Parboteeah, & Victor, 2003; Cullen, Victor, & Bronson, 1993), dan lain-lain.

Salah satu tujuan kajian etika dalam organisasi adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dan lancar, mampu meraih keuntungan dan berkembang di masa depan, serta terciptanya hubungan yang harmonis antara organisasi dengan anggotanya. Untuk menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis, organisasi menetapkan suatu pedoman tentang Perilaku yang Beretika (*Code of Conduct*) yang memuat nilai-nilai etika.

Nilai-nilai yang dianut oleh organisasi harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Organisasi serta harus diterapkan terlebih dahulu oleh jajaran pimpinan organisasi untuk selanjutnya meresap ke dalam jajaran organisasi. Perilaku yang Beretika perlu diterapkan untuk menjaga berlangsungnya lingkungan kerja yang profesional, jujur, terbuka, peduli, dan tanggap terhadap setiap kegiatan organisasi serta kepentingan pihak stakeholders.

Pada hakekatnya Perilaku yang Beretika (*ethical behavior*) berisi tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari. Maksud dan tujuan Perilaku yang Beretika ini tidak hanya untuk memastikan bahwa organisasi telah mematuhi semua

peraturan organisasi dan perundang-undangan yang terkait, namun memberikan panduan bagi organisasi atau anggota dalam melakukan interaksi berdasarkan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari budaya organisasi. Prinsip-prinsip perilaku etis dalam sektor publik tercermin dari adanya penerapan dan pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam organisasi, yaitu: Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Kemandirian (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*).

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Paradigma reformasi di Indonesia ditandai dengan munculnya semangat demokratisasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam sektor pendidikan. Isu strategis yang terus disuarakan oleh berbagai kalangan terhadap negeri ini diantaranya adalah tuntutan terhadap adanya *good governance*, dan akuntabilitas. Peningkatan iklim akuntabilitas pada sektor publik yang merupakan dimensi etis dari *good governance*. *Good governance* merupakan kesehatan moral sebuah organisasi (McNamee & Fleming, 2006). Terdapat suatu hubungan yang erat, bahwa akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik, berada dalam semua sektor, termasuk didalamnya akuntabilitas dan tata kelola yang baik bidang pendidikan.

Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun. Program BOS merupakan program nasional dibidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas (Kemendikbud, 2012). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 meletakkan prinsip pengelolaan dana pendidikan yang berdasarkan perinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas publik, efisiensi, dan keadilan. Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Pengelolaan BOS tidak terlepas dari peran kepala sekolah dalam mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Mulyasa (2007) menyatakan bahwa kepala sekolah profesional dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan sekolah, baik melakukan

perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pertanggungjawabannya. Aspek mendasar dari manajemen adalah perencanaan, dalam hal pembiayaan yang disebut penganggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kepala sekolah merencanakan keuangan untuk rencana kegiatan beserta sumber daya pendukung lainnya yang ada di sekolah merupakan sesuatu yang sangat penting.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program BOS pada umumnya adalah masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga dikhawatirkan pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan alokasi penggunaan dana yang dimaksud oleh pemerintah. Menurut penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, secara nasional dengan sampel sekolah 3.237 buah pada 33 provinsi ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 miliar. Rata-rata penyimpangan setiap sekolah mencapai Rp 13,6 juta dan terjadi pada 2.054 atau 63,5 persen dari total sampel sekolah yang diaudit. Data kejaksan dan kepolisian seluruh Indonesia periode 2004-2009 berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekolah, termasuk dana BOS. Kerugian negara dari kasus ini lebih kurang Rp 12,8 miliar. Faktor penyebab penyimpangan (perilaku tidak etis) dana BOS di tingkat sekolah, salah satu adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga atas pengelolaannya.

Menurut Tuanakotta (2007), mereka yang terlibat dalam perbuatan curang didorong oleh interaksi antara kekuatan-kekuatan dalam kepribadian individu dan lingkungan eksternal. Kekuatan-kekuatan tersebut diklasifikasi ke dalam tiga kategori utama: (1) tekanan situasional; (2) kesempatan dan; (3) karakteristik (integritas) pribadi. Dikatakan oleh Mulyadi (2011), kecurangan itu sendiri dikenal dengan istilah *fraud* di sektor publik, yang di Indonesia dikenal dengan istilah korupsi, yang antara lain merupakan tindakan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian Negara.

Peran kepala sekolah terhadap terjadinya *fraud* ini cukup besar. Pada kondisi ini diperlukan sikap etis dan perilaku etis dari kepala sekolah sebagai pengelola dana BOS. Peran yang dimaksudkan disini adalah satu set perilaku dimana orang atau kelompok mengharapkan dari orang lain. Ada bermacam masalah peran dalam dinamika suatu kelompok (Kreitner & Kinicki, 2001) yakni kelebihan peran (*role overload*), konflik peran (*role conflict*), ambiguitas peran (*role ambiguity*). Kinicki dan Kreitner selanjutnya menyatakan bahwa konflik peran yang dialami oleh seseorang bisa jadi disebabkan oleh nilai-nilai internal (prinsip moral), etika, standar pribadi yang berbenturan dengan harapan orang lain, dan masalah kepemimpinan.

Salah satu konsep untuk menekan terjadinya perilaku yang tidak beretika (korupsi), baik di perusahaan maupun pemerintahan adalah dengan *good governance*. *Good governance* merupakan elemen utama dan penting untuk menekan terjadinya korupsi (Demmers, Fernandez, Jilberto, & Hogenboom, 2004). Korupsi dikenal sebagai fungsi pengembalian relatif terhadap kegiatan produktif (Osborne, 2006). Korupsi adalah topik yang banyak dibicarakan dalam pentingnya pengembangan masyarakat di beberapa tahun terakhir. Secara empiris Korupsi memiliki peran sebagai penghambat modernisasi (Mo, 2001; Mauro, 1995).

Analisis terhadap sikap etis dalam profesi menunjukkan bahwa seseorang merasa memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan tidak etis akibat adanya tekanan dari lingkungan (Mintz, 1995, 2006). Studi tentang etika merupakan hal penting dalam rangka pengembangan dan peningkatan peran profesi guru, terutama bila dikaitkan dengan rawannya profesi ini terhadap perilaku tidak etis dalam pengelolaan dana BOS. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang baik tentang penyebab perilaku etis. Pemahaman yang baik tentang anteseden perilaku etis dan konsekuensinya terhadap kepuasan kerja akan memudahkan bagi organisasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dalam hal ini kepala sekolah. Penelitian terdahulu telah mengonfirmasi berbagai-bagai anteseden perilaku etis (Koh & Boo, 2001; Yetmar & Eastman, 2000; Ziegenfuss & Singhapakdi, 1994).

Kajian-kajian mengenai perilaku yang beretika di pemerintahan dan organisasi telah banyak dilakukan. Konsep *good governance* menjadi salah satu kajian untuk meningkatkan perilaku yang beretika dalam mengelola pemerintahan dan organisasi (Goede & Neuwirth, 2014; Quah, 2013). *Good governance* menjadi salah satu cara untuk menekan perilaku yang tidak etis yaitu korupsi (Osborne, 2006). Selain *good governance*, kajian-kajian mengenai keberagamaan (*religiosity*) juga telah banyak dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada perilaku yang beretika (Clark & Dawson, 1996; Khamis, Mohd, Salleh, & Nawawi, 2014; Weaver & Agle, 2002), perilaku organisasi (Olowookere, 2014). Keagamaan juga menjadi salah satu sumber untuk berperilaku yang beretika.

## 1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang seperti dijelaskan di atas, penelitian ini meneliti model dalam pengaruh Religiusitas dan penerapan Good Governance terhadap Perilaku Etis dengan Ethical Climate sebagai variabel mediating dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Bangkalan, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh langsung *religiusitas* terhadap *ethical behavior*

- b. Bagaimana pengaruh langsung *good governance* terhadap *ethical behavior*
- c. Bagaimana pengaruh langsung *religiusitas* terhadap *ethical climate*
- d. Bagaimana pengaruh langsung *good governance* terhadap *ethical climate*
- e. Bagaimana pengaruh tidak langsung *religiusitas* terhadap *ethical behavior* melalui *ethical climate*
- f. Bagaimana pengaruh tidak langsung *good governance* terhadap *ethical behavior* melalui *ethical climate*

## **2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis**

### *2.1. Moral Development Lawrence Kohlberg*

Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya (Kohlberg & Hersh, 1977; Kohlberg, 1984). Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral, yang merupakan dasar dari perilaku etis, mempunyai enam perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti Piaget (1958), yang menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Kohlberg & Hersh (1977) memperluas pandangan dasar ini dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan.

Kohlberg & Hersh (1977) menggunakan cerita-cerita tentang dilema moral dalam penelitiannya dan ia tertarik pada bagaimana orang-orang akan menjustifikasi tindakan-tindakan mereka bila mereka berada dalam persoalan moral yang sama. Kohlberg & Hersh (1977) kemudian mengkategorisasi dan mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam enam tahap yang berbeda. Keenam tahapan tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan: pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Enam tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg & Hersh (1977) yaitu :

1. Tingkat 1 (Pra-Konvensional)
  - a. Orientasi kepatuhan dan hukuman
  - b. Orientasi minat pribadi ( Apa untungnya buat saya?)
2. Tingkat 2 (Konvensional)
  - a. Orientasi keserasian interpersonal dan konformitas ( Sikap anak baik )
  - b. Orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial ( Moralitas hukum dan aturan)
3. Tingkat 3 (Pasca-Konvensional)
  - a. Orientasi kontrak sosial

## b. Prinsip etika universal (*Principled conscience*)

### 2.2. *Dana Bantuan Operasional Sekolah*

Pengertian Bantuan Operasional Sekolah adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (Kemendikbud, 2012). Bantuan dana BOS mempunyai 2 fungsi yang dapat digunakan sekolah untuk: (a) Dari sisi penerimaan (*revenue*) digunakan untuk membebaskan (*fee waive*) dan/atau memberikan potongan (*discount fee*) kepada siswa miskin dari kewajiban membayar tagihan biaya sekolah seperti iuran sekolah/sumbangan pembangunan pendidikan (SPP)/uang komite, biaya ujian, biaya praktek dan sebagainya. Jumlah siswa yang dibebaskan atau mendapat potongan biaya pendidikan sesuai dengan kebijakan (*diskresi*) sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada, dana yang diterima dan besarnya biaya sekolah. (b) Dari sisi pengeluaran (*expediture*) dapat digunakan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia dengan jenis pengeluaran atau biaya sebagaimana diatur Permendiknas No. 69 Tahun 2009.

Bantuan dana BOS bertujuan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada sekolah, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kesempatan kepada siswa miskin mengikuti pendidikan di tiap jenjang pendidikan (Kemendagri, 2011). Oleh karena itu, perlu dicari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa miskin dengan cara melibatkan peran pemda melalui BOS Daerah dan atau menerapkan subsidi silang.

### 2.3. *Perilaku Etis*

Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral (Suseno, 1987). Etika juga merupakan tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh individual atau suatu golongan tertentu (Khomsiyah & Indriantoro, 1998). Etika merupakan pedoman, atau ukuran berperilaku yang tercipta melalui konsensus atau keagamaan atau kebiasaan yang didasarkan pada nilai baik dan buruk (Desriani, 1993). Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya (Griffin & Ebert, 2007). Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Perilaku etis ini dapat menentukan kualitas individu (karyawan) yang dipengaruhi oleh

faktor-faktor yang diperoleh dari luar yang kemudian menjadi prinsip yang dijalani dalam bentuk perilaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis yaitu: (1) Budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi yang lain. Dengan demikian budaya organisasi adalah nilai yang dirasakan bersama oleh anggota organisasi yang diwujudkan dalam bentuk sikap perilaku pada organisasi. (2) Kondisi politik. Kondisi politik merupakan rangkaian asas atau prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. (3) Perekonomian global. Perekonomian global merupakan kajian tentang pengurusan sumber daya materian individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia

Beberapa penelitian menyatakan bahwa, perilaku yang beretika merupakan fungsi yang penting dalam pengelolaan organisasi (Ruiz-Palomino & Martínez-Cañas, 2011). Perilaku yang beretika menjadi hal yang penting dalam berbagai aktivitas kehidupan, meskipun dalam beberapa kasus penyimpangan etika masih banyak terjadi. Hal ini perlu dipikirkan kembali efisiensi strategi etika yang ada. Diantaranya adalah masih terjadinya kasus korupsi di berbagai perusahaan, terutamanya di pemerintahan. Korupsi menjadi isu yang menarik untuk dikaji, karena korupsi merupakan perilaku yang tidak beretika dalam aktivitas perusahaan maupun pemerintahan.

Menurut Kreitner & Kinicki (2001) dan Hunt & Vitell (1986), perilaku etis dan tidak etis adalah produk dari kombinasi yang rumit dari berbagai pengaruh. Individu mempunyai kombinasi unik dari karakteristik personalitas, nilai-nilai, prinsip-prinsip moral, pengalaman pribadi dengan penghargaan dan hukuman, sejarah hukuman kesalahan yang dilakukan (*history of reinforcement*), dan gender. Ada tiga sumber utama pengaruh atas harapan peran etis seseorang. Pertama adalah pengaruh budaya individu tersebut. Pengaruh budaya termasuk latar belakang keluarga, pendidikan, agama, media/hiburan. Kedua adalah pengaruh organisasi. Pengaruh organisasi dapat dalam bentuk kode etik, budaya organisasi, model peran (panutan), tekanan yang dirasakan untuk mencapai hasil, dan sistem penghargaan dan hukuman. Ketiga adalah pengaruh politik, hukum dan ekonomi. Beberapa bukti empiris sebelumnya telah menguji sebagian model di atas (Cohen, Pant, & Sharp, 1998; Jones & Hildebeitel, 1995; Weeks, Moore, McKinney, & Longenecker, 1999; Ziegenfuss & Singhapakdi, 1994).

Perilaku Etis yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh seseorang atau profesi

yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, pelaksanaan kode etik, dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik .

#### 2.4. *Religiusitas*

Keagamaan atau *religiusitas* diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Agama merupakan salah satu lembaga sosial yang paling universal dan memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap masyarakat, nilai-nilai, dan perilaku baik di tingkat individu dan masyarakat (Mokhlis, 2009). Menurut Kotler (2000) agama adalah bagian dari budaya yang dapat membentuk perilaku masyarakat. Artinya, bahwa orang yang memiliki agama akan memegang nilai-nilai tertentu yang dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan mereka (Alam, Mohd, & Hisham, 2011). Agama memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang dengan membentuk keyakinan, pengetahuan, dan sikap mereka (Rehman & Shabbir, 2010).

Tingkat keagamaan seseorang sulit diukur (Schutte & Hosch, 1996), karena memiliki beberapa definisi. Menurut Caird (1987) Ada tiga ukuran dari keagamaan : Kognitif (fokus pada sikap atau keyakinan agama), perilaku (mengevaluasi kehadiran ditempat ibadah dan doa pribadi), dan pengalaman (pengalaman mistik). Mookherjee (1993) mendefinisikan keagamaan sebagai aktivitas public dan partisipatif (berdasarkan keanggotaan gereja dan kehadiran di gereja), dan perilaku keagamaan pribadi (berdasarkan frekuensi doa, membaca al-kitab, dan intensitas ibadah) (Barhem, Younies, & Muhamad, 2009).

Cornwall, Albrecht, Cunningham, & Pitcher (1986) mendefinisikan Keagamaan dalam hal : (1) Cognition (ilmu agama, keyakinan agama). (2) Affect (yang berkaitan dengan ikatan emosional atau perasaan emosional tentang agama. (3) Behavior (berkaitan dengan afiliasi dan kehadiran di gereja, membaca al-kitab, dan berdoa). Bellah (1991) memberi makna keagamaan adalah seperangkat bentuk simbolis dan tindakan manusia yang berhubungan dengan kondisi akhir dari keberadaannya. Sementara Beit-Hallahmi & Argyle (1997) menyatakan bahwa keagamaan adalah sebuah sistem keyakinan dalam kekuatan ilahi yang maha besar dan praktik ibadah atau ritual lainnya yang diarahkan kepada kekuatan tersebut. Dan Dollahite (1998) mendefinisikan keagamaan merupakan sebuah komunitas perjanjian iman dengan ajaran dan narasi yang meningkatkan pencarian sakral.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa keberagamaan (*religiosity*) diketahui sebagai salah satu determinant yang mempengaruhi perilaku yang beretika. Keberagamaan memiliki peran dalam mempengaruhi perilaku social seseorang (Allport & Ross, 1967; Allport, 1967). McMahan (1986) percaya bahwa keberagamaan memberikan kontribusi pada etika bisnis. Keberagamaan memiliki hubungan yang positif dengan ideology etis yang memberikan

kontribusi positif pada niat untuk berperilaku (Barnett, Bass, & Brown, 1996). (Weaver & Agle, 2002) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keberagamaan dan perilaku. Ada perbedaan yang signifikan dari tingkat keberagamaan seseorang dalam memilih layanan perbankan islam (Ahmad, Rahman, Ali, & Seman, 2008). Keberagamaan menjadi determinan penting dalam perilaku konsumen (Alam, Janor, Zanariah, Wel, & Ahsan, 2012). Keberagamaan memiliki pengaruh untuk berperilaku dalam menghindari pajak. Keberagamaan adalah determinan penting perilaku penghindaran pajak oleh pembayar pajak perusahaan dan individu (Boone, Khurana, & Raman, 2012). Meskipun, pada kajian-kajian yang lain ada keterbatasan dan menyatakan bahwa keberagamaan tidak selalu memiliki pengaruh kepada perilaku yang beretika. Tidak ada hubungan antara keberagamaan dan keputusan yang beretika (Kidwell, Stevens, & Bethke, 1987). Clark & Dawson (1996) mendapatkan bahwa ada hubungan negative antara keberagamaan dan pertimbangan etika bisnis. Keberagamaan tidak mempengaruhi secara langsung penilaian etis terhadap perilaku yang beretika (Bakar, Lee, & Hashim, 2013). Keberagamaan memiliki hubungan yang lemah sebagai factor pembentuk kepemimpinan spiritual (Ayranci & Semercioz, 2011). Tingkat evaluasi diri (*iman*) tidak berhubungan secara signifikan terhadap perilaku karyawan (Barhem et al., 2009).

Dalam penelitian ini, mengacu kepada konsep keagamaan yang diungkapkan oleh McDaniel & Burnett (1990), bahwa keagamaan dianggap sebagai keyakinan seseorang pada Tuhan yang disertai dengan komitmen untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakini dan telah ditetapkan oleh Tuhan (Clark & Dawson, 1996; Weaver & Agle, 2002). Dimensi keagamaan bisa diukur dari komitmen keagamaannya (Glock, 1962; Stark & Glock, 1968). Komitmen keagamaan didefinisikan oleh Johnson, Jang, Larson, & Li (2001) sebagai komitmen seorang individu terhadap agama dan ajaran-ajarannya, seperti sikap dan perilaku individu yang mencerminkan komitmen tersebut. Adapun dimensi keagamaan menurut Stark & Glock (1968), yaitu: ideological, ritualistic, intellectual, experiential, consequential

## 2.5. *Good Governance*

Definisi governance bervariasi dalam lingkup dan isi, sebagian mengatakan bahwa istilah “governance” mencakup partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Bank Dunia, mendefinisikan governance sebagai tradisi dan institusi dimana kewenangan di sebuah negara dilaksanakan untuk kebaikan bersama (Farrington, 2010). Dalam beberapa tahun terakhir, akademisi dan praktisi politik sama-sama telah menjadi lebih sadar akan pentingnya *good governance* dalam konteks pembangunan bangsa (Rotberg & West, 2004; Rotberg, 2004).

*Good governance* menurut Kofi Annan (1998) merupakan faktor penting dalam pemberantasan kemiskinan dan mempromosikan pembangunan (Farrington, 2010), serta mengurangi tingkat kemiskinan di suatu Negara (Musalem & Ortiz, 2011). Selain itu, *good governance* juga dipahami sebagai proses negosiasi sosial, dan konflik yang dapat ditemukan dalam semua masyarakat dan interaksi sosial (Ginty, 2013).

Pada perkembangan selanjutnya, tata kelola yang baik (*good governance*) dijadikan sebagai salah satu cara yang efektif dalam menanggulangi kegiatan korupsi atau penipuan, juga membantu untuk menghindari konflik kepentingan dan berkontribusi terhadap budaya akuntabilitas dan transparansi (Demmers et al., 2004; Head, 2012). Di negara-negara demokratis, budaya akuntabilitas dan transparansi merupakan nilai-nilai yang harus ditegakkan dalam system pemerintahan dan kepemimpinan politik.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good governance* yaitu: (1) Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. (2) Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. (3) Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. (4) Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. (5) Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

## 2.6. *Ethical Climate*

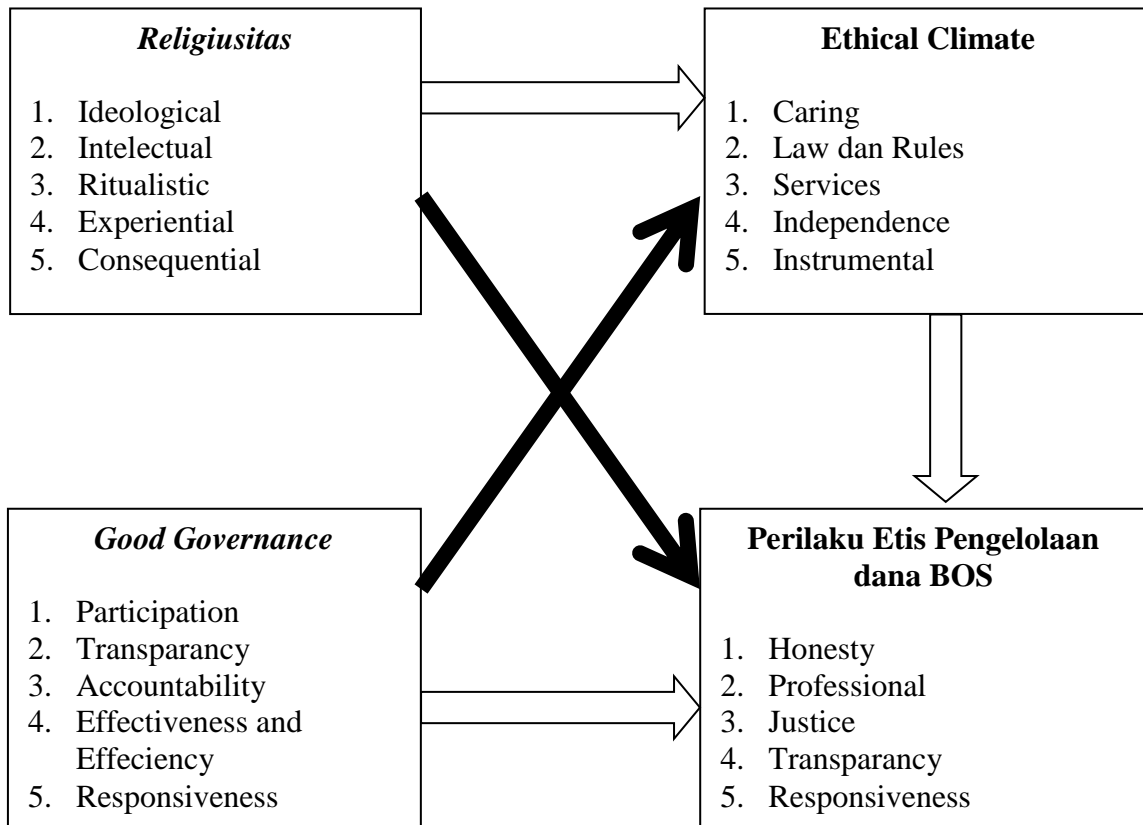
Iklm etika (*ethical climate*) merupakan suatu pandangan atau persepsi yang berlaku dalam tipe organisasi, baik organisasi profesional seperti akuntan maupun organisasi non-profesional. Dan prosedur yang digunakan dalam organisasi tersebut memiliki standar etika dalam mengatur perilakunya. Menurut Agoes & Ardana (2011) *ethical climate* adalah pemahaman tidak terucap dari semua karyawan (pelaku bisnis) tentang perilaku yang dapat dan tidak dapat diterima. Iklm etika adalah lingkungan psikologis di mana perilaku individu berlangsung (Buchan, 2006). Gerakan iklm etika kepada karyawan dan perilaku apa yang dapat diterima (Treviño, Butterfield, & McCabe, 1998). Sebuah pandangan tentang

bagaimana iklim etika dan budaya organisasi memiliki hubungan penting. Iklim etika adalah subkomponen dari budaya organisasi. Cullen et al. (2003) mendefinisikan iklim etika sebagai komponen lingkungan individu seperti yang dirasakan oleh anggota. Victor & Cullen (1988) mengusulkan dua dimensi tipologi konsep dari tipe iklim, yaitu kriteria etis (*ethical criteria*) dan lokus analisis (*the locus analysis*). Dan membagi ethical climate berdasarkan pada tiga kelompok teori etis, yaitu egoisme, utilitarisme, dan deontologi (Shafer, Poon, & Tjosvold, 2013a, 2013b; Shafer, 2009).

Verbos, Gerard, Forshey, Harding, & Miller (2007) menyarankan bahwa organisasi etis positif muncul karena adanya unsur organisasi tertentu. Unsur-unsur atau praktik organisasi di antaranya adalah kepemimpinan otentik, struktur organisasi formal dan informal etis, proses dan sistem yang selaras dengan praktek etika, dan budaya etis didukung oleh identitas etika yang menonjol di antara anggota yang menciptakan iklim etis yang kuat.

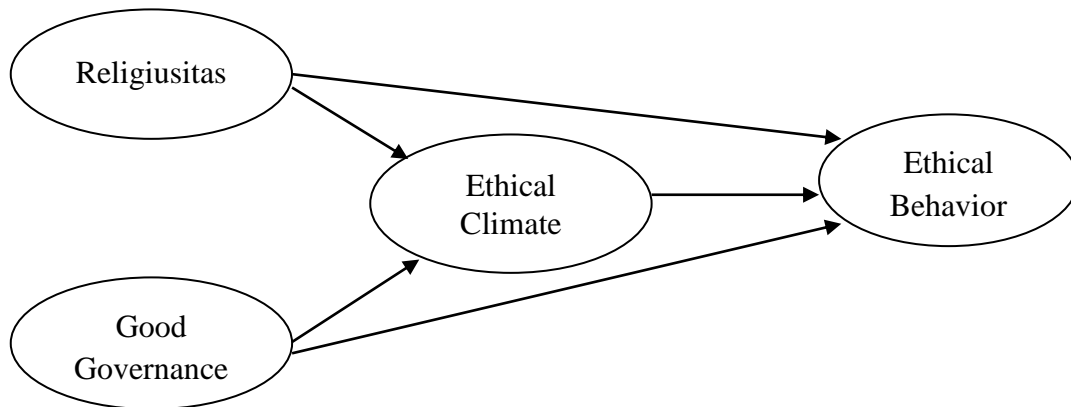
Iklim yang Beretika (*ethical climate*) adalah persepsi yang berlaku secara khas dalam organisasi berupa praktek dan prosedur yang memiliki kandungan nilai-nilai yang beretika (Cullen et al., 1993). Iklim yang beretika adalah konstruk yang memiliki multi-dimensi yang mengidentifikasi system normative dalam sebuah organisasi sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan dan untuk menyikapi dilema etika. Oleh karenanya iklim yang beretika diukur dengan lima item yaitu : caring, law and rules, service, independence, dan instrumental.

Menurut landasan teori mengenai perilaku etis (*ethical behavior*), keberagamaan (*religiosty*), tata kelola yang baik (*good governance*) dan iklim etis (*ethical climate*), maka dapat disusun kerangka pikir gambar 1 sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Dari kerangka pikir tersebut disusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

Bedasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah di atas, maka dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- Religiusitas berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap Perilaku Etis (*ethical behavior*)
- Good Governance berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap Perilaku Etis (*ethical behavior*)

- c. Religiusitas berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap Iklim yang Beretika (*ethical climate*)
- d. Good Governance berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap Iklim yang Beretika (*ethical climate*)
- e. Iklim yang Beretika (*ethical climate*) memediasi hubungan antara Religiusitas terhadap Perilaku Etis (*ethical behavior*)
- f. Iklim yang Beretika (*ethical climate*) memediasi hubungan antara Good Governance terhadap Perilaku Etis (*ethical behavior*)

### **3. Metodologi Penelitian**

#### *3.1. Desain Penelitian*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Menurut Malhotra (2004, 2010) penelitian kuantitatif adalah metodologi penelitian yang mencari kuantitas data dan biasanya, berlaku beberapa analisis yang digunakan untuk statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori kausal. Menurut Umar (2008) penelitian eksplanatori (*explanatory research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Penulis menggunakan metode eksplanatori kausal untuk menjelaskan hubungan pengaruh antar variabel sehingga mendapatkan informasi spesifik mengenai dampak religiusitas dan good governance terhadap ethical climate dan ethical behavior pengelola dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Desain penelitian ini adalah survey. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Pengambilan data menggunakan survey langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket). Menurut Malhotra (2004) kuesioner adalah teknik terstruktur untuk pengumpulan data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan, tertulis atau lisan, untuk menanggapi jawaban. Kuesioner ini digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Religiusitas dan Good Governance terhadap Ethical Behavior dengan Ethical Climate sebagai variabel mediating.

Tabel 1. *Pengukuran Operasional Variabel*

Variabel	Cara pengukuran	Skala	Sumber Data
Religiusitas	Aspek religiusitas diukur dengan 5 dimensi, yaitu: ideological, intelektual, ritualistic, experiential, dan consequential (Glock, 1962; Stark & Glock, 1968). menggunakan skala Likert (1 – 5)	Rasio	Primer
Good Governance	Prinsip good governance diukur dengan 5 dimensi, yaitu: participation, transparency, accountability, effectiveness and efficiency, responsiveness (Waema & Mitullah, 2007; Zeyn, 2011). menggunakan skala Likert (1 – 5)	Rasio	Primer
Ethical Climate	Konsep ethical climate diukur dengan 5 dimensi, yaitu: caring, law dan rules, services, independence, dan instrumental (Cullen et al., 1993). menggunakan skala Likert (1 – 5)	Rasio	Primer
Ethical Behavior	Aspek ethical behavior diukur dengan 5 dimensi, yaitu: honesty, profesional, justice, transparency, dan responsiveness (Karami, Olfati, & Dubinsky, 2014). menggunakan skala Likert (1 – 5)	Rasio	Primer

Sumber: Peneliti

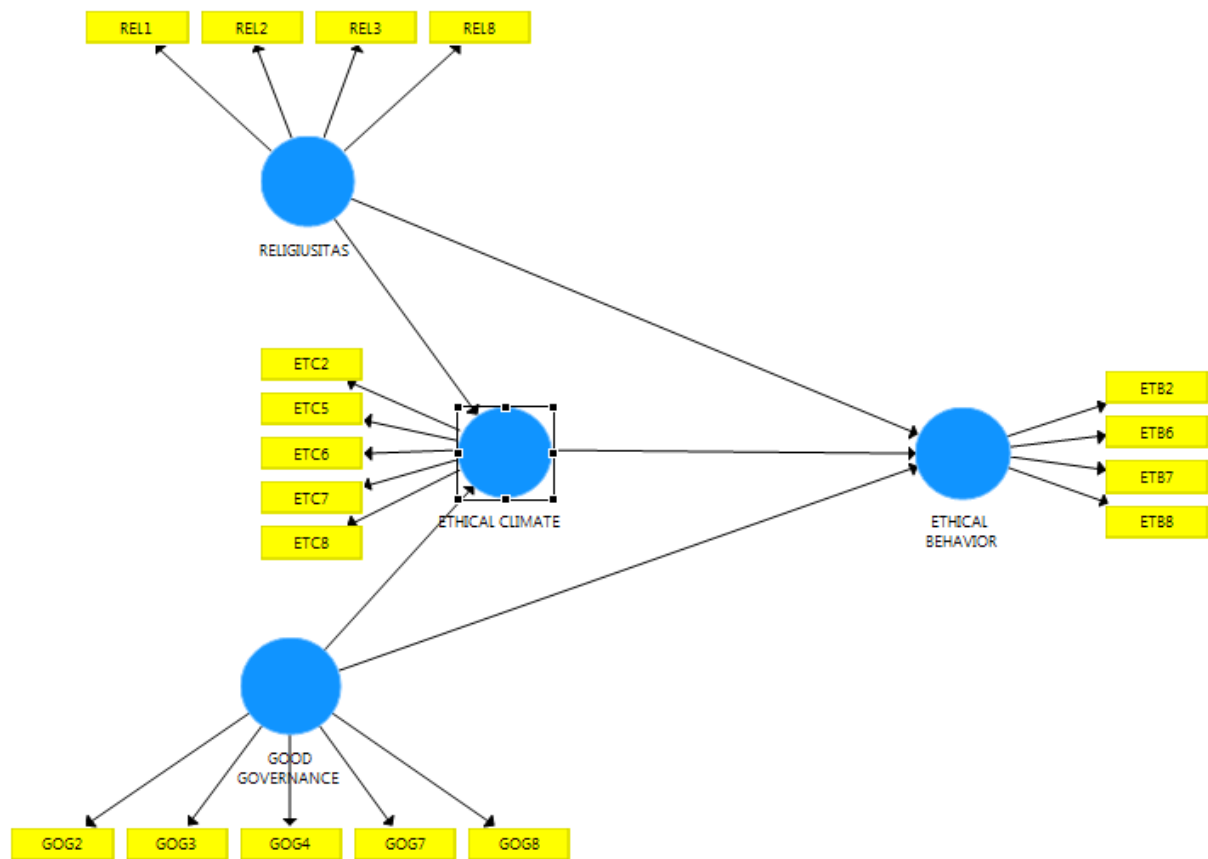
### 3.2. *Populasi dan Sample*

Populasi penelitian ini adalah sekolah tingkat SMP Negeri dan Swasta penerima Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Kabupaten Bangkalan sejumlah 261 sekolah. Unit analisisnya adalah Kepala Sekolah sebagai pengambil kebijakan pengelolaan Dana BOS. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling*, dimana semua populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden (Sugiyono, 2007). Dan dengan pertimbangan untuk menghemat waktu dan biaya, maka teknik pemilihan sampel pada penelitian ini adalah metode *simple random sampling*, yaitu teknik memilih sampel dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel (Sekaran & Bougie, 2013). Adapun sampel yang digunakakan adalah 155 sekolah (Krejcie & Morgan, 1970).

### 3.3. *Teknik Analisis Data*

Teknis analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis statistika Structural Equation Modelling berbasis variance dengan Metode Partial Least Square (PLS). PLS sebagai model prediksi tidak mengasumsikan distribusi tertentu untuk mengestimasi parameter dan memprediksi

hubungan kausalitas (Hair, Sarstedt, Ringle, & Mena, 2012). Karena itu, teknik parametrik untuk menguji signifikasnsi parameter tidak diperlukan dan model untuk prediksi bersifat non-parametrik. Evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi outer model dan inner model. Outer model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Melalui proses bootstrapping, parameter uji T-statistic diperoleh untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas.



Gambar 3. Model penelitian berbasis *Partial Least Square* (PLS)

## 4. Hasil Penelitian

### 4.1. Profile Responden

Hasil analisis data deskriptif mengenai demografi responden dapat dilihat pada tabel 2. Di antara 155 responden, (79.35%) atau 123 orang adalah laki-laki dan (20.65%) atau 32 orang adalah perempuan. Mayoritas responden (60%) atau 93 orang berada dalam kelompok

umur antara 31-40. Di sisi lain, (14,84%) usia dari responden berada di kisaran 31 sampai 40 tahun sebanyak 23 orang, sebanyak (3,22%) atau sekitar 5 orang berada pada usia kurang dari 30 tahun, dan sisanya (21,94%) atau sekitar 34 orang berusia di atas 51 tahun. Mayoritas responden memiliki gelar sarjana (63,23%) atau 98 orang, diikuti oleh responden memiliki gelar master (36,77%) sebanyak 57 orang.

Tabel 2. *Profile Responden*

<b>Profile</b>	<b>Kategori</b>	<b>Frekwensi</b>	<b>Prosentase (%)</b>
Jenis Kelamin	Pria	123	79.35%
	Wanita	32	20.65%
Usia	< 30 tahun	5	3.22%
	31 – 40 tahun	23	14.84%
	41 – 50 tahun	93	60.00%
	> 51 tahun	34	21.94%
Pendidikan	Sarjana	98	63.23%
	Master	57	36.77%
	Doktor	0	0.00%

Sumber : Data diolah 2016

#### 4.2. Hasil Analisis Data

##### a. Convergent Validity

Evaluasi pertama pada outer model adalah convergent validity. Convergent validity diukur dengan melihat nilai outer loading dari masing-masing indikator dan juga dilihat pada nilai Average Variance Extracted (AVE). Suatu indikator dikatakan memenuhi convergent validity jika memiliki nilai outer loading  $\geq 0,708$  dan nilai Average Variance Extracted (AVE)  $\geq 0,50$  (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). Tabel 3 menunjukkan hasil analisis data diketahui nilai outer loading untuk masing-masing indikator pada variabel penelitian semuanya memiliki nilai lebih dari 0,708 dan nilai Average Variance Extracted (AVE) 0,50 (*Lampiran 5*). Hal ini berarti indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi convergent validity yang dilihat dari nilai outer loadings dan Average Variance Extracted (AVE).

##### b. Discriminant Validity

Evaluasi kedua pada outer model adalah discriminant validity. Discriminant validity diukur dengan menggunakan cross loading. Suatu indikator dikatakan memenuhi discriminant validity jika nilai cross loading indikator terhadap variabelnya adalah yang

terbesar dibandingkan terhadap variabel lainnya (Hair et al., 2014). Nilai cross loading pada penelitian ini disajikan pada (*Lampiran 6 dan 7*). Berdasarkan nilai cross loading, dapat diketahui bahwa semua indikator yang menyusun masing-masing variabel dalam penelitian ini telah memenuhi discriminant validity karena memiliki nilai outer loading terbesar untuk variabel yang dibentuknya dan tidak pada variabel yang lain. Dengan demikian semua indikator ditiap variabel dalam penelitian ini telah memenuhi discriminant validity.

*c. Composite Reliability*

Evaluasi terakhir pada outer model adalah composite reliability. Composite reliability menguji kekonsistenan indikator-indikator dalam mengukur suatu konstruk. Suatu konstruk atau variabel dikatakan memenuhi composite reliability jika memiliki nilai composite reliability  $\geq 0,70$  (Hair et al., 2014). Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai composite reliability dari setiap variabel penelitian memiliki nilai  $> 0.70$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi composite reliability, dan data yang diperoleh sangat reliabel. Selain menggunakan composite reliability, untuk menguji reliabilitas dilihat dari nilai cronbach's alpha  $> 0.60$ .

Tabel 3. Hasil analisis outer model

Latent Variabel	Indicators	Loadings	Indicator Reliability	Composite Reliability	AVE	Discriminant Validity
RELIGIUSITAS	REL1	0.882	0.723	0.827	0.551	Yes
	REL2	0.802				
	REL3	0.639				
	REL8	0.612				
GOOD GOVERNANCE	GOG2	0.705	0.772	0.845	0.524	Yes
	GOG3	0.603				
	GOG4	0.740				
	GOG7	0.714				
	GOG8	0.837				
ETHICAL CLIMATE	ETC2	0.725	0.763	0.841	0.515	Yes
	ETC5	0.615				
	ETC6	0.776				
	ETC7	0.681				
	ETC8	0.777				
ETHICAL BEHAVIOR	ETB2	0.800	0.755	0.837	0.566	Yes
	ETB6	0.760				

	ETB7	0.611			
	ETB8	0.820			

Sumber : Data diolah 2016

#### 4.3. Hasil Pengujian Hipotesis

##### a. Nilai R-Square

Evaluasi pertama pada inner model dilihat dari nilai R-Square atau koefisien determinasi. Berdasarkan pengolahan data dengan PLS, dihasilkan nilai R-Square sebagai berikut:

Tabel 4. R-Square

	<b>R Square</b>	<b>R Square Adjusted</b>
RELIGIUSITAS		
ETHICAL CLIMATE	0.481	0.377
ETHICAL BEHAVIOR	0.386	0.474
GOOD GOVERNANCE		

Sumber : Data diolah 2016

Nilai R-Square untuk Ethical Climate adalah sebesar 0.481 memiliki arti bahwa prosentase besarnya pengaruh Religiusitas dan Good Governance terhadap Ethical Climate adalah sebesar 48.1% sedangkan sisanya yaitu sebesar 51.9% dijelaskan oleh variabel lain. Nilai R-Square untuk Ethical Behavior adalah sebesar 0.386 memiliki arti bahwa prosentase besarnya pengaruh Religiusitas, Good Governance dan Ethical Climate terhadap Ethical Behavior adalah sebesar 38.6% sedangkan sisanya yaitu sebesar 61.4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model.

Pada model PLS, penilaian goodness of fit diketahui dari nilai Q2. Nilai Q2 memiliki arti yang sama dengan koefisien determinasi (R-Square) pada analisis regresi, di mana semakin tinggi R-Square, maka model dapat dikatakan semakin fit dengan data. Dari Tabel 5 dapat dihitung nilai Q2 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Q2} &= 1 - (1 - 0.481) \times (1 - 0.386) \\
 &= 1 - (0.519 \times 0.614) \\
 &= 1 - 0.318666 \\
 &= 0.681334
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan diketahui nilai Q2 sebesar 0.681, artinya besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model struktural yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebesar 68.1%. Berdasarkan hasil ini, model struktural pada penelitian telah memiliki *goodness of fit* yang baik.

*b. Pengujian Hipotesis*

Pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan analisis PLS dilakukan dengan menggunakan tabel inner weight. Hipotesis penelitian dapat diterima jika nilai t hitung (T-statistic)  $\geq$  t tabel pada tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 5% yaitu  $\geq 1,96$ . Syarat mediating adalah jika hubungan langsung (*direct relationship*) antar variabel yang diukur adalah signifikan (Hair et al., 2014). Pada penelitian ini hubungan langsung variabel adalah RELIGIUSITAS --> ETHICAL BEHAVIOR dan GOOD GOVERNANCE --> ETHICAL BEHAVIOR. Dari hasil uji signifikansi diperoleh bahwa P-value  $< \alpha = 0.05$  dan T-statistic  $> t$  tabel = 1.96, RELIGIUSITAS --> ETHICAL BEHAVIOR (0.001  $< \alpha = 0.05$ ) dan P-value GOOD GOVERNANCE --> ETHICAL BEHAVIOR (0.000  $< \alpha = 0.05$ ). Artinya, hubungan langsung kedua variabel independen terhadap variabel dependen adalah Signifikan (*tabel 5*). Berikut adalah nilai koefisien path (original sample estimate) dan nilai hitung (t-statistic) pada inner model.

Tabel 5. Hasil Nilai Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values, P-Values)

	<b>Original Sample (O)</b>	<b>Sample Mean (M)</b>	<b>Standard Deviation (STDEV)</b>	<b>T Statistics (O/STDEV)</b>	<b>P Values</b>
<b>RELIGIUSITAS -&gt; ETHICAL BEHAVIOR</b>	<b>0.301</b>	0.297	0.086	<b>3.482</b>	<b>0.001</b>
<b>GOOD GOVERNANCE -&gt; ETHICAL BEHAVIOR</b>	<b>0.393</b>	0.404	0.089	<b>4.438</b>	<b>0.000</b>
<b>RELIGIUSITAS -&gt; ETHICAL CLIMATE</b>	0.218	0.214	0.088	2.479	0.014
<b>GOOD GOVERNANCE -&gt; ETHICAL CLIMATE</b>	0.541	0.552	0.079	6.868	0.000

Sumber : Data diolah 2016

Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang berbunyi religiusitas berpengaruh langsung dan signifikan terhadap perilaku etis (*ethical behavior*) dalam pengelolaan Dana BOS. Berdasarkan hasil

perhitungan diperoleh hasil uji nilai t- statistik sebesar 3.482 dan t- Tabel sebesar 1.96 (pada tingkat kesalahan  $\alpha = 0.05\%$ ) dan P-value  $0.001 < \alpha = 0.05$ . Sedangkan nilai koefisien estimasi ( $\beta$ ) sebesar 0.301. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel religiusitas terhadap perilaku etis. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang dalam organisasi maka akan semakin tinggi pula perilaku etis dalam pengelolaan Dana BOS. Dengan kata lain bila kualitas religiusitas ditingkatkan secara baik pada pengelolaan Dana BOS, maka akan dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap perilaku etis para pengelola Dana BOS. Dengan demikian, maka hipotesis pertama telah terbukti, dan diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Boone, Khurana, & Raman (2012) yang menyatakan bahwa keberagaman memiliki pengaruh untuk berperilaku dalam menghindari pajak. Keberagaman adalah determinan penting perilaku penghindaran pajak oleh pembayar pajak perusahaan dan individu. Ahmad, Rahman, Ali, & Seman, (2008) yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan dari tingkat keberagaman seseorang dalam memilih layanan perbankan islam. Keberagaman menjadi determinan penting dalam perilaku konsumen (Alam et al., 2012). Keberagaman memiliki hubungan yang positif dengan ideology etis yang memberikan kontribusi positif pada niat untuk berperilaku (Barnett et al., 1996). (Weaver & Agle, 2002) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keberagaman dan perilaku.

#### Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang berbunyi good governance berpengaruh langsung dan signifikan terhadap perilaku etis (*ethical behavior*) dalam pengelolaan Dana BOS. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil uji nilai t- statistik sebesar 4.438 dan t- Tabel sebesar 1.96 (pada tingkat kesalahan  $\alpha = 0.05\%$ ) dan P-value  $0.000 < \alpha = 0.05$ . Sedangkan nilai koefisien estimasi ( $\beta$ ) sebesar 0.393. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel good governance terhadap perilaku etis. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat penerapan good governance dalam organisasi maka akan semakin tinggi pula perilaku etis dalam pengelolaan Dana BOS. Dengan kata lain bila kualitas penerapan good governance ditingkatkan secara baik pada pengelolaan Dana BOS, maka akan dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap perilaku etis para pengelola Dana BOS. Dengan demikian, maka hipotesis kedua telah terbukti, dan diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Demmers et al. (2004) yang menyatakan bahwa *good governance* merupakan elemen utama dan penting untuk menekan terjadinya korupsi (perilaku tidak etis).

#### Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga yang berbunyi religiusitas berpengaruh langsung dan signifikan terhadap iklim yang beretika (*ethical climate*). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil uji nilai t- statistik sebesar 2.479 dan t- Tabel sebesar 1.96 (pada tingkat kesalahan  $\alpha = 0.05\%$ ) dan P-value  $0.014 < \alpha = 0.05$ . Sedangkan nilai koefisien estimasi ( $\beta$ ) sebesar 0.218. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel religiusitas terhadap iklim yang beretika. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang dalam organisasi maka akan semakin tinggi pula iklim yang beretika yang terbentuk dalam organisasi pengelolaan Dana BOS. Dengan kata lain bila kualitas religiusitas ditingkatkan secara baik pada seseorang, maka akan dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap iklim yang beretika dalam organisasi pengelolaan Dana BOS. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga telah terbukti, dan diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Emerson & Mckinney (2010) bahwa religiusitas memiliki peran penting dalam menciptakan iklim yang beretika. Artinya, kualitas keberagamaan seseorang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap iklim yang beretika.

#### Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat yang berbunyi *good governance* berpengaruh langsung dan signifikan terhadap iklim yang beretika (*ethical climate*). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil uji nilai t- statistik sebesar 6.868 dan t- Tabel sebesar 1.96 (pada tingkat kesalahan  $\alpha = 0.05\%$ ) dan P-value  $0.000 < \alpha = 0.05$ . Sedangkan nilai koefisien estimasi ( $\beta$ ) sebesar 0.541. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel *good governance* terhadap iklim yang beretika. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat penerapan *good governance* dalam organisasi maka akan semakin tinggi pula iklim yang beretika dalam organisasi pengelolaan Dana BOS. Dengan kata lain bila kualitas penerapan *good governance* ditingkatkan secara baik pada pengelolaan Dana BOS, maka akan dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap iklim yang beretika para pengelola Dana BOS. Dengan demikian, maka hipotesis keempat telah terbukti, dan diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Argyriades (2006) bahwa *good governance* memiliki peran terhadap terciptanya iklim yang beretika dalam organisasi. Artinya, *good governance* mampu menekan terjadinya perilaku yang tidak etis (korupsi).

c. Pengujian Hipotesis dengan Mediating Variabel

Tabel 6. Hasil analisis tanpa mediating  
Tanpa mediating (*without MV*)

	Path Coefficient	P-value
RELIGIUSITAS --> ETHICAL BEHAVIOR	0.301	0.001
GOOD GOVERNANCE --> ETHICAL BEHAVIOR	0.393	0.000

Tabel 7. Hasil analisis dengan mediating  
Dengan mediating (*with MV*)

	Direct Effect		Indirect Effect
	REL --> ETC	ETC --> ETB	REL --> ETB
<b>REL --&gt; ETB</b>	0.225 (0.014)	0.068 (0.471)	0.015 (0.525)
<b>GOG --&gt; ETB</b>	<b>GOG --&gt; ETC</b>	<b>ETC --&gt; ETB</b>	<b>GOG --&gt; ETB</b>
	0.539 (0.000)	0.068 (0.471)	0.037 (0.490)

Tabel 8. Kesimpulan mediating

DV ; ETHICAL BEHAVIOR			
	Without MV	With MV	Conclusion
RELIGIUSITAS	0.301	0.015	<i>No Mediation</i>
GOOD GOVERNANCE	0.393	0.037	<i>No Mediation</i>

Untuk mengetahui bahwa sebuah variabel menjadi perantara atau tidak, bisa dilihat dari nilai Variance Accounted For (VAF). Adapun nilai VAF diperoleh dari hasil bagi indirect effect dengan total effect (IF/TE), jika nilai VAF > 80% maka mediasinya adalah *full mediation*, jika nilai 20% < VAF < 80% maka mediasinya adalah *partial mediation*, dan jika nilai VAF < 20% maka mediasinya adalah *no mediation* (Hair et al., 2014).

Hipotesis Kelima

Hipotesis kelima yang berbunyi Iklim yang Beretika (*ethical climate*) memediasi hubungan antara religiusitas terhadap perilaku etis (*ethical behavior*). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai VAF 5%, hal ini bermakna 5% pengaruh religiusitas kepada *ethical behavior* diterangkan oleh mediasi atau perantara *ethical climate*. Oleh karena nilai

VAF < 20%, maka pengaruh mediasi tidak ada mediasi (*no mediation*). Hal ini berarti bahwa iklim yang beretika (*ethical climate*) tidak memediasi hubungan antara religiusitas dan perilaku etis. Dengan demikian, maka hipotesis keenam tidak terbukti, dan ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Barnett et al. (1996) yang menyatakan bahwa *ethical climate* yang dideskripsikan dengan ideology tidak memediasi hubungan antara religiusitas terhadap *ethical judgment* dan *behavioral intentions*.

#### Hipotesis Keenam

Hipotesis keenam yang berbunyi Iklim yang Beretika (*ethical climate*) memediasi hubungan antara *good governance* terhadap perilaku etis (*ethical behavior*). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai VAF 9%, hal ini bermakna 9% pengaruh *good governance* kepada *ethical behavior* diterangkan oleh mediasi atau perantara *ethical climate*. Oleh karena nilai VAF < 20%, maka pengaruh mediasi tidak ada mediasi (*no mediation*). Hal ini berarti bahwa iklim yang beretika (*ethical climate*) tidak memediasi hubungan antara *good governance* dan perilaku etis. Dengan demikian, maka hipotesis ketujuh tidak terbukti, dan ditolak.

## 5. Penutup

### 5.1. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, dapat dipertimbangkan bahwa tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai kumpulan fitur penting yang membentuk sebuah organisasi. Oleh karena itu, untuk memahami identitas sebuah organisasi atau lembaga, harus mengetahui peran tata kelola yang baik pada waktu yang sama. *Good governance* berfungsi sebagai identitas dan juga perencanaan strategis organisasi dengan tidak memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dapat menggunakan *good governance* sebagai cara untuk memahami identitas organisasi; dan organisasi juga dapat menggunakannya sebagai alat untuk membangun identitas organisasi mereka. Selain itu peningkatan pemahaman dan internalisasi ajaran-ajaran agama dalam kehidupan merupakan suatu yang sangat penting, karena agama menjadi petunjuk dan arah dalam melaksanakan segala aktivitas.

## 5.2. Keterbatasan

Setiap proyek penelitian yang dilakukan disetiap bidang studi selalu dibatasi oleh berbagai keterbatasan. Karena kendala waktu, penelitian ini adalah *cross-sectional*, dan dibatasi oleh metode survei, yang melarang pengumpulan informasi yang menyeluruh. Desain *cross-sectional* terbatas temuan pada periode terbatas untuk pengumpulan data. Pengaturan penelitian hanya difokuskan pada SMP Negeri dan SMP swasta di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia. Replikasi penelitian untuk segmen lain dari sektor publik (misalnya: sekolah dasar atau sekolah menengah atas) akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap implementasi *good governance* pada sektor publik di Indonesia.

Untuk para praktisi di antaranya kepala sekolah, penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku etis dan kinerja organisasi.

## 5.3. Implikasi Teoritis

Organisasi yang menerapkan *good governance* dengan baik sangat mempengaruhi *ethical behavior*. Hasil penelitian ini diharapkan para pengelola Dana BOS (Kepala Sekolah) lebih termotivasi untuk menerapkan dan melaksanakan *good governance* yang baik agar organisasi memiliki perilaku yang etis (*ethical behavior*) dalam mengelola Dana BOS.

## 5.4. Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan pada penelitian mendatang terkait dengan: Pertama, adanya pengaruh yang signifikan religiusitas terhadap perilaku etis (*ethical behavior*). Implikasinya pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap program-program peningkatan Iman dan Taqwa (IMTAQ) diberbagai lembaga baik lembaga pemerintahan mahupun non-pemerintahan, sehingga dapat membentengi perilaku yang tidak etis dari para aparat pemerintahan, khususnya para pengelola Dana BOS (Kepala Sekolah). Kedua, dengan adanya pengaruh yang signifikan *good governance* terhadap perilaku etis (*ethical behavior*), implikasinya jika suatu organisasi ingin berkelanjutan harus menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* pada masing-masing organisasi atau lembaganya.

## 5.5. Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

Temuan dari studi ini menarik perhatian beberapa arah untuk penelitian lebih lanjut yang akan dilakukan dalam bidang ini. Satu catatan penting adalah bahwa penelitian selanjutnya harus menggunakan konstruksi yang diwakili oleh variable yang multi-dimensi

untuk menangkap esensi dari sebuah model penelitian. Perhatian harus dilakukan sebagai penguatan yang memiliki dimensi bervariasi dan peneliti harus menyesuaikan kesesuaian masing-masing dimensi berdasarkan tujuan penelitian.

Studi selanjutnya harus menggunakan kedua metode kuantitatif dan kualitatif karena hal ini dapat menyajikan informasi yang lebih mendalam dan mengatasi kelemahan masing-masing metodologi. Selain itu, kepemimpinan yang etis (*ethical leadership*) bisa dijadikan sebagai variabel, karena perilaku etis tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan yang beretika dalam sebuah organisasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penelitian selanjutnya mencakup wilayah yang lebih luas dari sektor publik di bidang pendidikan. Karena tata kelola yang baik (*good governance*) tidak hanya terbatas pada sektor publik di bidang pendidikan, investigasi serupa dapat direplikasi dalam kegiatan sektor publik lainnya seperti bank, pemerintah daerah, rumah sakit, dan industri lainnya. Replikasi penelitian ini dimungkinkan karena praktik tata kelola yang baik sejalan dengan sifat pelayanan yang dilakukan oleh sektor publik. Studi semacam ini relatif masih baru di Indonesia, studi selanjutnya akan memperkaya tubuh pengetahuan tentang sektor publik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2011). *Etika bisnis dan profesi: Tantangan membangun manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad, W. M. W., Rahman, A. A., Ali, N. A., & Seman, A. C. (2008). Religiosity and banking selection criteria among Malays in Lembah Klang. *Jurnal Syariah*, 16(2), 279–304.
- Alam, S. S., Janor, H., Zanariah, Wel, C. A. C., & Ahsan, M. N. (2012). Is religiosity an important factor in influencing the intention to undertake Islamic home financing in Klang Valley? *World Applied Sciences Journal*, 19(7), 1030–1041. <http://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2012.19.07.392>
- Alam, S. S., Mohd, R., & Hisham, B. (2011). Is religiosity an important determinant on Muslim consumer behaviour in Malaysia? *Journal of Islamic Marketing*, 2(1), 83–96. <http://doi.org/DOI 10.1108/17590831111115268>
- Allport, G. W. (1967). The religious context of prejudice. *Pastoral Psychology*, 18(5), 20–30. <http://doi.org/10.1007/BF01762402>
- Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5(4), 432–443. <http://doi.org/10.1037/h0021212>
- Argyriades, D. (2006). Good governance, professionalism, ethics and responsibility. *International Review of Administrative Sciences*. <http://doi.org/10.1177/0020852306064607>

- Aristoteles. (1953). *The Ethics of Aristotle: The Nichomachean Ethics*. (J. A. K. Thomson, Ed.). England: Penguin Books.
- Ayranci, E., & Semercioz, F. (2011). The relationship between spiritual leadership and issues of spirituality and religiosity : A study of top Turkish managers. *International Journal of Business and Management*, 6(4), 136–149. <http://doi.org/10.5539/ijbm.v6n4p136>
- Bakar, A., Lee, R., & Hashim, N. H. (2013). Parsing religiosity, guilt and materialism on consumer ethics. *Journal Islamic Marketing*, 4(3), 232–244. <http://doi.org/DOI 10.1108/JIMA-04-2012-0018>
- Barhem, B., Younies, H., & Muhamad, R. (2009). Religiosity and work stress coping behavior of Muslim employees. *Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues*, 2(2), 123–137. <http://doi.org/DOI 10.1108/17537980910960690>
- Barnett, T., Bass, K., & Brown, G. (1996). Religiosity, ethical ideology, and intentions to report a peer's wrongdoing. *Journal of Business Ethics*, 15(11), 1161–1174. <http://doi.org/10.1007/BF00412815>
- Beit-Hallahmi, B., & Argyle, M. (1997). *The psychology of religious behaviour, belief and experience*. London: Routledge.
- Bellah, R. N. (1991). *Beyond belief: Essays on religion in a post-traditionalist world*. London: University of California Press, Ltd.
- Bertens, K. (2000). *Pengantar etika bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Boone, J., Khurana, I. K., & Raman, K. K. (2012). Religiosity and tax avoidance. *The Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 121022143747007. <http://doi.org/10.2308/atax-50341>
- Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. *The Leadership Quarterly*, 17(6), 595–616. <http://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.004>
- Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. a. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 97(2), 117–134. <http://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.03.002>
- Buchan, H. F. (2006). The relationship between ethical climate and leadership culture during different stages of organizational life cycle: A conceptual framework. In *American Accounting Association's Annual Meeting* (p. 6).
- Caird, D. (1987). Religiosity and personality: are mystics introverted, neurotic, or psychotic? *The British Journal of Social Psychology / the British Psychological Society*, 26 ( Pt 4)(1987), 345–346.
- Clark, J. W., & Dawson, L. E. (1996). Personal religiousness and ethical judgements: An empirical analysis. *Journal of Business Ethics*, 15(3), 359–372. <http://doi.org/10.1007/BF00382959>
- Cohen, J. R., Pant, L. W., & Sharp, D. J. (1998). The effect of gender and academic discipline diversity on the ethical evaluations, ethical intentions and ethical orientation of potential public accounting recruits. *Accounting Horizons*, September, 250–270.
- Cornwall, M., Albrecht, S. L., Cunningham, P. H., & Pitcher, B. L. (1986). The dimensions of religiosity: A conceptual model with an empirical test. *Review of Religious Research*, 27(3), 226–244. <http://doi.org/10.2307/3511418>
- Cullen, J. B., Parboteeah, K. P., & Victor, B. (2003). The effects of ethical climates on organizational commitment: A two-study analysis. *Journal of Business Ethics*, 46(2),

127–141. <http://doi.org/10.1023/A:1025089819456>

- Cullen, J. B., Victor, B., & Bronson, J. W. (1993). The ethical climate questionnaire: An assessment of its development and validity. *Psychological Reports*. <http://doi.org/10.2466/pr0.1993.73.2.667>
- Demmers, J., Fernandez, A. E., Jilberto, & Hogenboom, B. (2004). Good governance and democracy in a world of neoliberal regimes. In J. Demmers, A. E. Fernandez, Jilberto, & B. Hogenboom (Eds.), *Good governance in the era of global neoliberalism: Conflict and depoliticisation in Latin America, Eastern Europe, Asia and Africa* (pp. 1–37). London: Routledge.
- Desriani, R. (1993). *Persepsi akuntan publik terhadap kode etik akuntan indonesia*. Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tesis tidak dipublikasikan).
- Dollahite, D. (1998). Fathering, faith, and spirituality. *The Journal of Men's Studies*, 7(1), 3–15. <http://doi.org/10.3149/jms.0701.3>
- Emerson, T. L. N., & Mckinney, J. A. (2010). Importance of religious beliefs to ethical attitudes in business. *Journal of Religion and Business Ethics*, 1(2), 1–17.
- Farrington, C. (2010). Putting good governance into practice II: Critiquing and extending the Ibrahim Index of African governance. *Progress in Development Studies*, 10(1), 81–86. <http://doi.org/10.1177/146499340901000106>
- Ginty, R. Mac. (2013). Hybrid governance: The case of Georgia. *Global Governance*, 19(3), 443–461.
- Glock, C. Y. (1962). On the study of religious commitment. *Religious Education*, 57(sup4), 98–110. <http://doi.org/10.1080/003440862057S407>
- Goede, M., & Neuwirth, R. J. (2014). Good governance and confidentiality: A matter of the preservation of the public sphere. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 14(4), 543–554. <http://doi.org/10.1108/CG-08-2013-0099>
- Griffin, R. W., & Ebert, R. J. (2007). *Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Hair, J. F., Hult, J. G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. California: Sage Publications Inc.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2012). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 40(3), 414–433. <http://doi.org/10.1007/s11747-011-0261-6>
- Head, B. W. (2012). The contribution of integrity agencies to good governance. *Policy Studies*, 33(1), 7–20. <http://doi.org/10.1080/01442872.2011.601200>
- Hunt, S. D., & Vitell, S. (1986). A general theory of marketing ethics. *Journal of Macromarketing*, 6(1), 5–16. <http://doi.org/10.1177/027614678600600103>
- Johnson, B. R., Jang, S. J., Larson, D. B., & Li, S. De. (2001). Does adolescent religious commitment matter? A reexamination of the effects of religiosity on delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(1), 22–43.
- Jones, S. K., & Hildebeitel, K. M. (1995). Organizational influence in a model of the moral decision process of accountants. *Journal of Business Ethics*, 14(6), 417–431.
- Karami, M., Olfati, O., & Dubinsky, A. J. (2014). Influence of religiosity on retail salespeople's ethical perceptions: the case in Iran. *Journal of Islamic Marketing*, 5(1), 144–172. <http://doi.org/DOI 10.1108/JIMA-12-2012-0068>

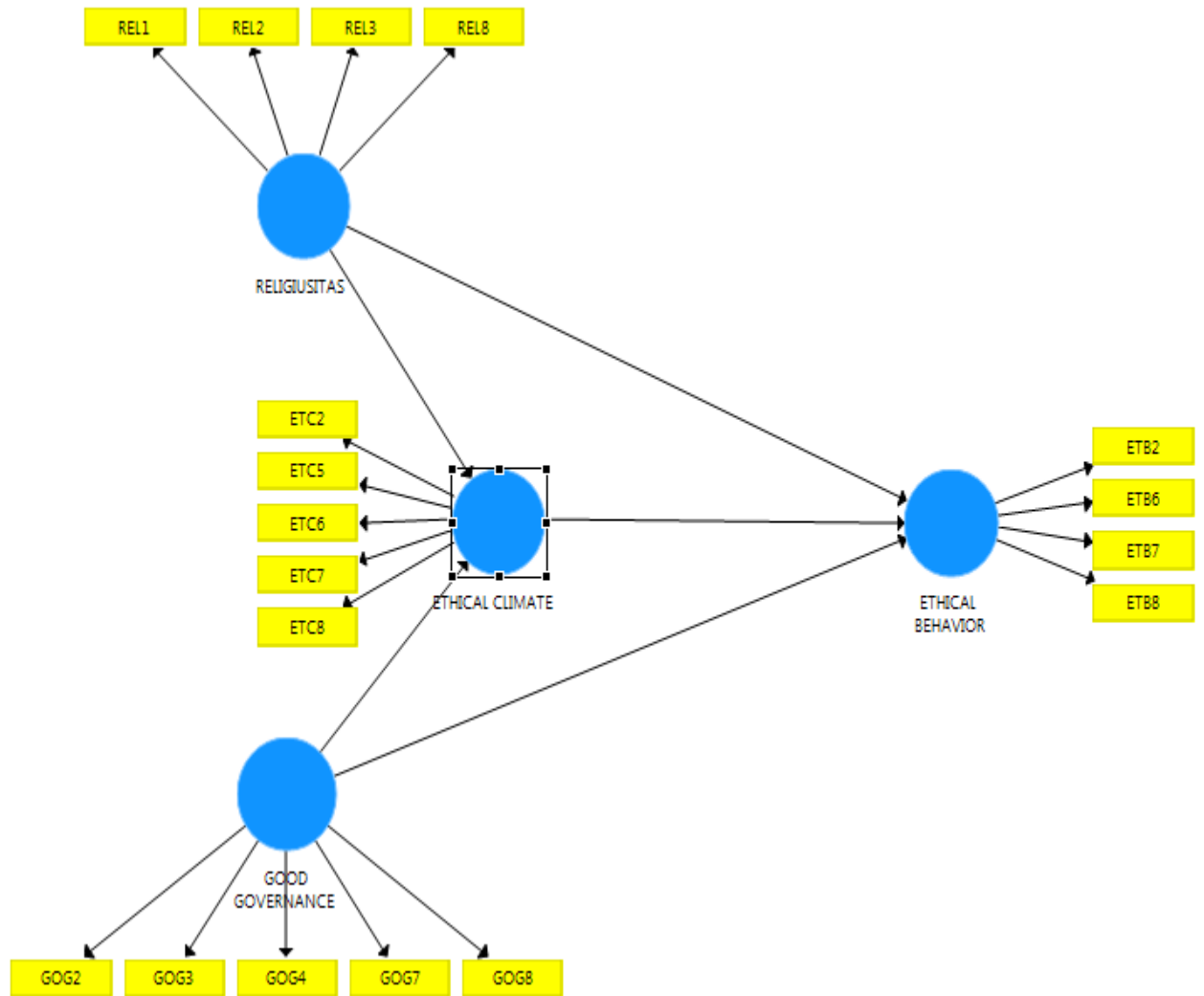
- Kemendagri. Peraturan Mendagri No.62 Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan BOS (2011).
- Kemendikbud. (2012). *Petunjuk teknis penggunaan dana BOS*.
- Khamis, R. M., Mohd, R., Salleh, A., & Nawati, A. S. (2014). Do religious practices influence compliance behaviour of business zakat among SMEs? *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 2(2), 1–16. Retrieved from <http://www.jeeir.com/index.php/jeeir/article/view/115/46>
- Khomsiyah, & Indriantoro, N. (1998). Pengaruh orientasi etika terhadap komitmen dan sensitivitas etika auditor pemerintah di DKI Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 1(1), 13–28.
- Kidwell, J. M., Stevens, R. E., & Bethke, A. L. (1987). Differences in ethical perceptions between male and female managers: Myth or reality? *Journal of Business Ethics*, 6(6), 489–493. <http://doi.org/10.1007/BF00383291>
- Koh, H. C., & Boo, E. H. Y. (2001). The link between organizational ethics and job satisfaction: A study of managers in Singapore. *Journal of Business Ethics*, 29(4), 309–324.
- Kohlberg, L. (1984). Essays on moral development. *The Psychology of Moral Development*.
- Kohlberg, L., & Hersh, R. H. (1977). Moral development: A review of the theory. *Theory into Practice*, 16(2), 53–59. Retrieved from <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00405847709542675>
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2001). *Organizational behavior*. New York: McGraw-Hill.
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. *Education and Psychological Measurement*, 30, 607–610. <http://doi.org/10.1177/001316447003000308>
- Malhotra, N. K. (2004). *Marketing research: An applied orientation*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Malhotra, N. K. (2010). *Marketing research* (6 ed). United States of America: Prentice Hall, Inc.
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2946696>
- McDaniel, S. W., & Burnett, J. J. (1990). Consumer religiosity and retail store evaluative criteria. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 18(2), 101–112. <http://doi.org/10.1007/BF02726426>
- McMahon, T. F. (1986). Creed, cult, code and business ethics. *Journal of Business Ethics*, 5(6), 453–463.
- McNamee, M. J., & Fleming, S. (2006). Ethics audits and corporate governance: The case of public sector sports organizations. *Journal of Business Ethics*, 73(4), 425–437. <http://doi.org/10.1007/s10551-006-9216-0>
- Mintz, S. M. (1995). Virtue ethics and accounting education. *Issues in Accounting Education*. Retrieved from [http://works.bepress.com/steven\\_mintz/6/](http://works.bepress.com/steven_mintz/6/)
- Mintz, S. M. (2006). Accounting ethics education: Integrating reflective learning and virtue ethics. *Journal of Accounting Education*, 24(2-3), 97–117. <http://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2006.07.004>
- Mo, P. H. (2001). Corruption and economic growth. *Journal of Comparative Economics*, 29(1), 66–79. <http://doi.org/10.1006/jcec.2000.1703>

- Mokhlis, S. (2009). Relevancy and measurement of religiosity in consumer behavior research. *International Business Research*, 2, 75–84.
- Mulyasa, E. (2007). *Menjadi guru profesional: Menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan*. Bandung: Rosdakarya.
- Musalem, A. R., & Ortiz, M. D. (2011). Governance and social security: Moving forward on the ISSA good governance guidelines. *International Social Security Review*, 64(4), 9–37. <http://doi.org/10.1111/j.1468-246X.2011.01409.x>
- Olowookere, E. I. (2014). Influence of religiosity and organizational commitment on organizational citizenship behaviours : A critical review of literature. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 1(3), 48–63. <http://doi.org/10.14738/assrj.13.61>
- Osborne, E. (2006). Corruption and technological progress: A takeoff theory of good governance. *Atlantic Economic Journal*, 34(3), 289–302. <http://doi.org/10.1007/s11293-006-9017-y>
- Quah, J. S. T. (2013). Ensuring good governance in Singapore: Is this experience transferable to other Asian countries? *International Journal of Public Sector Management*, 26(5), 401–420. <http://doi.org/10.1108/IJPSM-05-2013-0069>
- Rehman, A.-, & Shabbir, M. S. (2010). The relationship between religiosity and new product adoption. *Journal of Islamic Marketing*, 1(1), 63–69. <http://doi.org/10.1108/17590831011026231>
- Rotberg, R. I. (2004). Strengthening governance: Ranking countries would help. *The Washington Quarterly*, 28(1), 71–81. <http://doi.org/10.1162/0163660042518215>
- Rotberg, R. I., & West, D. L. (2004). The good governance problem: Doing something about it. *WPF Report*, (39), 1–92.
- Ruiz-Palomino, P. P., & Martínez-Cañas, R. P. (2011). Corporate ethics and ethical behaviour: The significant function of top management role modelling. *The Review of Business Information Systems*, 15(5), 69–74. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/900729053?accountid=14549&nhttp://hl5yy6xn2p.search.serialssolutions.com/?genre=article&sid=ProQ:&atitle=Corporate+Ethics+And+Ethical+Behaviour:+The+Significant+Function+Of+Top+Management+Role+Modelling&title=The+Review+>
- Schutte, J. W., & Hosch, H. M. (1996). Optimism, religiosity, and neuroticism: A cross-cultural study. *Personality and Individual Differences*, 20(2), 239–244.
- Schwartz, M. (2001). The nature of the relationship between corporate codes of ethics and behaviour. *Journal of Business Ethics*, 32(3), 247–262. <http://doi.org/10.1023/A:1010787607771>
- Schwartz, M. S., & Weber, J. (2006). A Business Ethics National Index (BENI) : Measuring Business Ethics Activity Around the World. *Business & Society*, 45(3), 382–405. <http://doi.org/10.1177/089202060001400305>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research methods for business: A skill building approach* (6th ed.). Singapore: John Wiley & Sons, Inc.
- Shafer, W. E. (2009). Ethical climate, organizational-professional conflict and organizational commitment: A study of Chinese auditors. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 22(7), 1087–1110. <http://doi.org/10.1108/09513570910987385>
- Shafer, W. E., Poon, M. C. C., & Tjosvold, D. (2013a). An investigation of ethical climate in a Singaporean accounting firm. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(2),

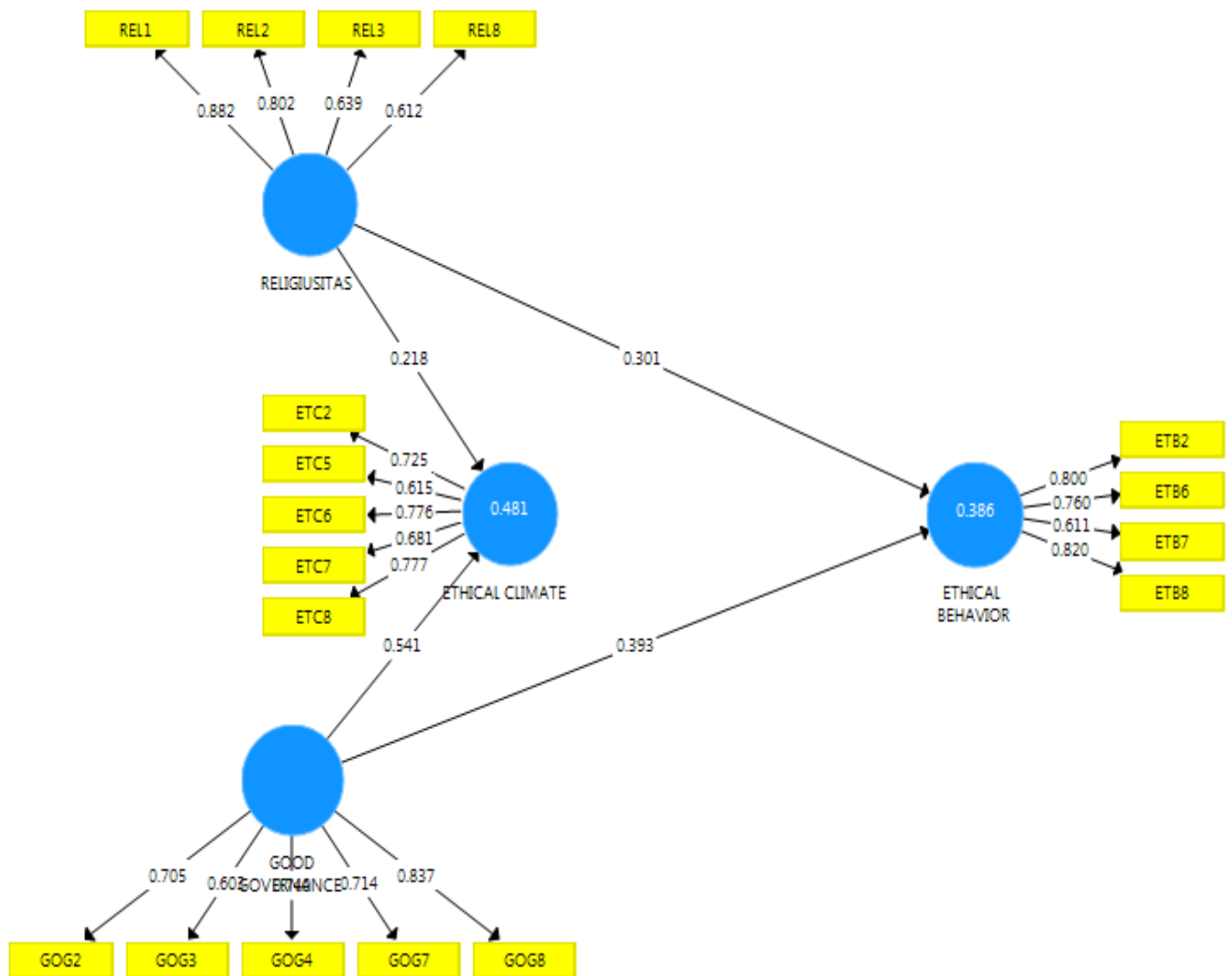
312–343. <http://doi.org/DOI.10.1108/09513571311303747>

- Shafer, W. E., Poon, M. C. C., & Tjosvold, D. (2013b). Ethical climate, goal interdependence, and commitment among Asian auditors. *Managerial Auditing Journal*, 28(3), 217–244. <http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/02686901311304358>
- Stark, R., & Glock, C. Y. (1968). *American piety: The nature of religious commitment*. California: University of California Press.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suseno, F. M. (1987). *Etika dasar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Treviño, L. K., Butterfield, K. D., & McCabe, D. L. (1998). The ethical context in organizations: Influences on employee attitudes and behaviors. *Business Ethics Quarterly*, 8(3), 447–476.
- Tuanakotta, T. M. (2007). *Akuntansi forensik dan audit investigatif*. Jakarta: LPFE UI.
- Umar, H. (2008). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis (1 ed)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Verbos, A. K., Gerard, J. A., Forshey, P. R., Harding, C. S., & Miller, J. S. (2007). The positive ethical organization: Enacting a living code of ethics and ethical organizational identity. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 17–33.
- Victor, B., & Cullen, J. B. (1988). The organizational bases of Ethical Work Climates. *Administrative Science Quarterly*, 33, 101–125. <http://doi.org/10.2307/2392857>
- Waema, T. M., & Mitullah, W. (2007). E-governance and governance: A case study of the assessment of the effects of integrated financial management system on good governance in two municipal councils in Kenya. *Proceedings of the 1st International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*, 263–268. <http://doi.org/http://doi.acm.org/10.1145/1328057.1328113>
- Weaver, G. R., & Agle, B. R. (2002). Religiosity and ethical behavior in organizations: A symbolic interactionist perspective. *Academy of Management Review*, 27(1), 77–97. <http://doi.org/10.5465/AMR.2002.5922390>
- Weeks, W. A., Moore, C. W., McKinney, J. A., & Longenecker, J. G. (1999). The effects of gender and career stage on ethical judgment. *Journal of Business Ethics*, 20(4), 301–313.
- Yetmar, S. A., & Eastman, K. K. (2000). Tax practitioners' ethical sensitivity: A model and empirical examination. *Journal of Business Ethics*, 26(4), 271–288.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan. *Trikonomika*, 10(1), 52–62.
- Ziegenfuss, D. E., & Singhapakdi, A. (1994). Professional values and the ethical perceptions of internal auditors. *Managerial Auditing Journal*, 9(1), 34–44. <http://doi.org/10.1108/02686909410050433>

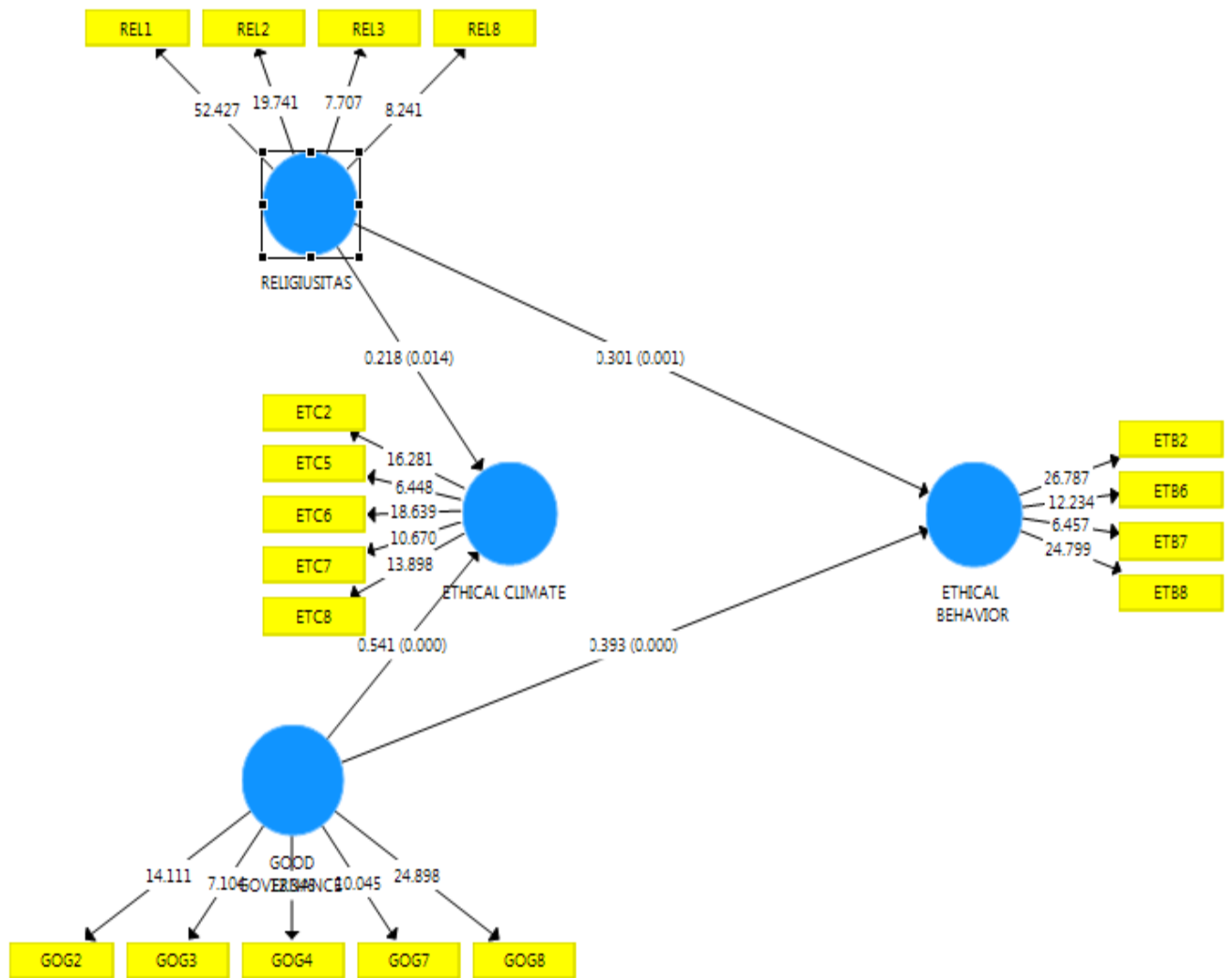
## Lampiran 1: Model penelitian berbasis PLS



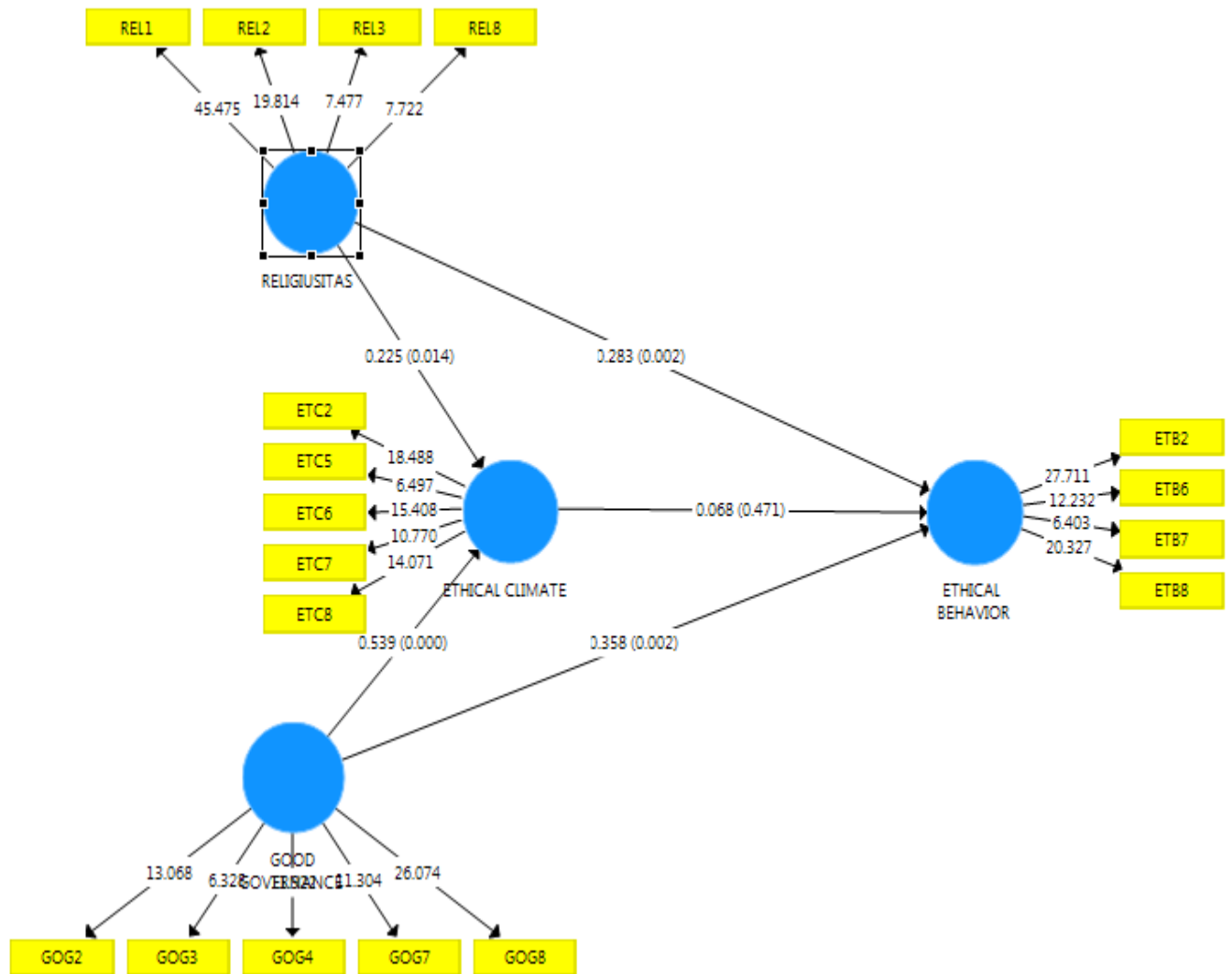
Lampiran 2:



### Lampiran 3: Direct relationship



### Lampiran 4: Indirect relationship



## Lampiran 5: Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha
ETHICAL BEHAVIOR	0.566	0.837	0.386	0.755
ETHICAL CLIMATE	0.515	0.841	0.481	0.763
GOOD GOVERNANCE	0.524	0.845		0.772
RELIGIUSITAS	0.551	0.827		0.723

## Lampiran 6: Discriminant Validity

### Fornell-Larcker Criterion

	ETHICAL BEHAVIOR	ETHICAL CLIMATE	GOOD GOVERNANCE	RELIGIUSITAS
ETHICAL BEHAVIOR	0.752			
ETHICAL CLIMATE	0.456	0.718		
GOOD GOVERNANCE	0.572	0.671	0.724	
RELIGIUSITAS	0.535	0.540	0.594	0.742

### Cross Loadings

	ETHICAL BEHAVIOR	ETHICAL CLIMATE	GOOD GOVERNANCE	RELIGIUSITAS
ETB2	<b>0.800</b>	0.501	0.587	0.411
ETB6	<b>0.760</b>	0.199	0.223	0.233
ETB7	<b>0.611</b>	0.331	0.268	0.274
ETB8	<b>0.820</b>	0.274	0.476	0.559
ETC2	0.481	<b>0.725</b>	0.566	0.515
ETC5	0.226	<b>0.615</b>	0.374	0.271
ETC6	0.292	<b>0.776</b>	0.571	0.295
ETC7	0.315	<b>0.681</b>	0.434	0.446
ETC8	0.263	<b>0.777</b>	0.409	0.368
GOG2	0.452	0.505	<b>0.705</b>	0.572
GOG3	0.253	0.314	<b>0.603</b>	0.320
GOG4	0.378	0.479	<b>0.740</b>	0.380
GOG7	0.426	0.514	<b>0.714</b>	0.287
GOG8	0.504	0.565	<b>0.837</b>	0.549
REL1	0.518	0.444	0.525	<b>0.882</b>
REL2	0.407	0.434	0.433	<b>0.802</b>
REL3	0.351	0.447	0.356	<b>0.639</b>
REL8	0.256	0.221	0.478	<b>0.612</b>

### Lampiran 7: Outer Loadings

	ETHICAL BEHAVIOR	ETHICAL CLIMATE	GOOD GOVERNANCE	RELIGIUSITAS
ETB2	0.800			
ETB6	0.760			
ETB7	0.611			
ETB8	0.820			
ETC2		0.725		
ETC5		0.615		
ETC6		0.776		
ETC7		0.681		
ETC8		0.777		
GOG2			0.705	
GOG3			0.603	
GOG4			0.740	
GOG7			0.714	
GOG8			0.837	
REL1				0.882
REL2				0.802
REL3				0.639
REL8				0.612

### Lampiran 8: Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
GOOD GOVERNANCE -> ETHICAL BEHAVIOR	0.393	0.404	0.089	4.438	0.000
GOOD GOVERNANCE -> ETHICAL CLIMATE	0.541	0.552	0.079	6.868	0.000
RELIGIUSITAS -> ETHICAL BEHAVIOR	0.301	0.297	0.086	3.482	0.001
RELIGIUSITAS -> ETHICAL CLIMATE	0.218	0.214	0.088	2.479	0.014

### Lampiran 9: Path Coefficient

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
ETHICAL CLIMATE -> ETHICAL BEHAVIOR	0.068	0.070	0.094	0.722	0.471
GOOD GOVERNANCE -> ETHICAL BEHAVIOR	0.358	0.363	0.116	3.076	0.002
GOOD GOVERNANCE -> ETHICAL CLIMATE	0.539	0.550	0.082	6.543	0.000
RELIGIUSITAS -> ETHICAL BEHAVIOR	0.283	0.280	0.091	3.115	0.002
RELIGIUSITAS -> ETHICAL CLIMATE	0.225	0.222	0.092	2.456	0.014

### Lampiran 10: Indirect Effects

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
ETHICAL CLIMATE -> ETHICAL BEHAVIOR					
GOOD GOVERNANCE -> ETHICAL BEHAVIOR	0.037	0.038	0.053	0.691	0.490
GOOD GOVERNANCE -> ETHICAL CLIMATE					
RELIGIUSITAS -> ETHICAL BEHAVIOR	0.015	0.017	0.024	0.637	0.525
RELIGIUSITAS -> ETHICAL CLIMATE					

### Lampiran 11: Total Effects

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
ETHICAL CLIMATE -> ETHICAL BEHAVIOR	0.068	0.070	0.094	0.722	0.471
GOOD GOVERNANCE -> ETHICAL BEHAVIOR	0.394	0.401	0.098	4.031	0.000
GOOD GOVERNANCE -> ETHICAL CLIMATE	0.539	0.550	0.082	6.543	0.000
RELIGIUSITAS -> ETHICAL BEHAVIOR	0.298	0.297	0.091	3.264	0.001
RELIGIUSITAS -> ETHICAL CLIMATE	0.225	0.222	0.092	2.456	0.014